



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2025

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TERNATE**



Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (LKj SKIPM Ternate) Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban SKIPM Ternate dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya. Landasan Penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan rencana AKSI SKIPM Ternate Tahun 2025. Secara umum, pada Triwulan I Tahun 2025 sebagian target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Adapun beberapa IKU yang masih belum dapat dicantumkan hasil capainnya dikarenakan pengukuran bersifat semester atau tahunan yang akan dilaksanakan kegiatannya pada triwulan II, III dan IV dan akan diukur setiap per triwulan dan kumulatif diukur pada akhir tahun. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Ternate dimasa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai SKIPM Ternate dan emua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Ternate, 16 April 2025

Kepala SKIPM Ternate



Arsal, S.St.Pi, M.P

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	7
2.1. CAPAIAN KINERJA	8
2.2. ANALISI DAN EVALUASI	9
2.3. REALISASI ANGGARAN	11
BAB III PENUTUP	13
LAMPIRAN NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN PUBLIK DI SKIPM TERNATE	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM TERNATE Tahun 2025	6
Tabel 2.1	Capaian Kinerja SKIPM TERNATE Triwulan I Tahun 2025	8
Tabel 2.2	Target dan Realisasi IKS 01.3 Pada Triwulan I Tahun 2025	10
Tabel 2.3	Target dan Realisasi IKS 01.4 Pada Triwulan I Tahun 2025	10
Tabel 2.4	Target dan Realisasi IKS 02.1 Pada Triwulan I Tahun 2025	11
Tabel 2.5	Target dan Realisasi IKS 02.5 Pada Triwulan I Tahun 2025	12
Tabel 2.6	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Triwulan I Tahun 2025	12
Tabel 2.7	Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025	12

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	5
Gambar 2.1	Dashboard Capaian IKU pada aplikasi kinerjajaku	7

Nilai capaian Kinerja IKU dan IKK SKIPM Ternate pada Triwulan I Tahun 2025 adalah Sebesar 113,58% Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) SKIPM Ternate yang telah ditetapkan dengan Hasil sebagai berikut:

A. Dari 14 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada tahun 2025, hasil persentase terhadap realisasi tahunan terdapat 4 Target IKU pada Triwulan 1 yang pencapaiannya memenuhi target yaitu:

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)
2. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)
3. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)
4. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di SKIPM Ternate (Nilai)

Kinerja keuangan SKIPM Ternate Triwulan I 2025 baru mencapai **Rp. 533,680,732** atau **19.88%** dari pagu anggaran DIPA sebesar **Rp. 2.684.228.000,00**. Pagu anggaran tersebut dilaksanakan melalui DIPA Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM TERNATE) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Oleh karena itu SKIPM Ternate dituntut untuk melaksanakan kinerja secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Ternate dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi SKIPM Ternate. Disamping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap bidang Tata Usaha, Tata Pelayanan, Wasdalin dan Jabatan Fungsional serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Ternate. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. SKIPM TERNATE mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM TERNATE menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengujian terhadap mutu hasil kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
3. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
4. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
5. Penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
6. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pada Tahun 2024 terjadi pengalihan kelembagaan dan tugas fungsi karantina ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini sesuai dengan peraturan tersebut terdapat pemisahan fungsi Karantina Ikan yang sebelumnya dibawah Kementerian kelautan dan Perikanan beralih ke Lembaga Badan Karantina Indonesia yang baru sedangkan untuk fungsi penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan masih jadi bagian tugas fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan numenklatur Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berubah dan telah ditetapkan menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/

2024 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian kelautan dan Perikanan. Untuk Unit Pelaksana Teknis masih nama UPT Numenklatur BPPMHKP dan menunggu perubahan numenklatur UPT yang baru.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala Unit Pelaksana Teknis SKIPM Ternate dibantu oleh 1 (satu) eselon V, 2 (dua) Koordinator dan kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi (Gambar 1.1) sebagai berikut:

1. Koordinator Tata Pelayanan mempunyai Tugas melakukan pencegahan masuk, tersebanya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya hama dan penyakit ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap hama dan penyakit ikan karantina, hama dan penyakit ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (Biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembutan koleksi media pembawa, hama dan penyakit ikan karantinadan/ atau hama dan penyakit ikan tertentu;
2. Koordinator Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, dan Keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikandan hasil perikanan di unit pengolahan ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional di SKIPM TERNATE terdiri dari Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pranata Komputer dan Arsiparis.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung kinerja SKIPM TERNATE selama Triwulan I Tahun 2024 berjumlah 6 orang pegawai dengan komposisi Kepala UPT 1 orang, Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama sebanyak 1 orang, Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil sebanyak 3 orang, tenaga administrasi sebanyak 1 orang serta dibantu oleh petugas PPNPN sebanyak 7 orang dan Petugas PJLP sebanyak 4 orang.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.3. SASARAN, INDIKATOR KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berskesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta Strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM Ternate Tahun 2025

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Ternate Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	99
SK 2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	4.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	75
		5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	75
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70
14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	88		

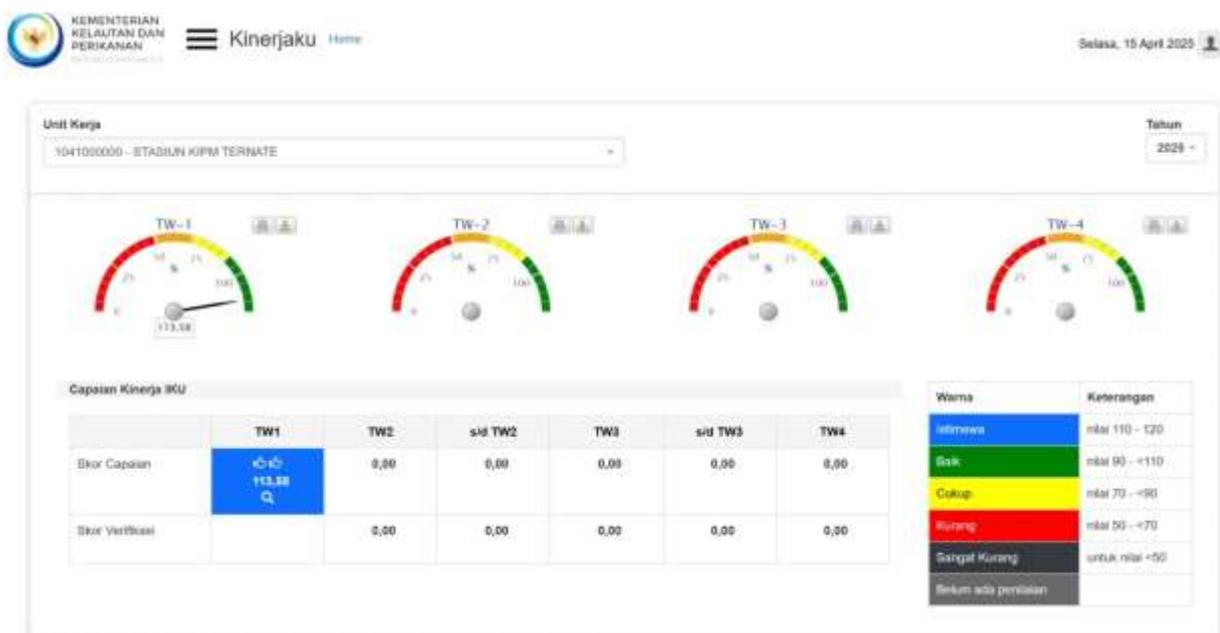
BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate (SKIPM Ternate) merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh bidang di lingkungan SKIPM Ternate. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup SKIPM Ternate, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala setiap Triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian Kinerja IKU SKIPM Ternate pada Triwulan I 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan Nilai capaian kinerja IKU sebesar 113,58% dan nilai capaian kinerja IKU dan IKK Sebesar 113,58. Capaian IKU merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. Capaian Kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan I Tahun 2025 ini capaiannya belum tercapai maksimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa indikator kinerja yang pengukuran pencapaiannya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan pencapaian yang sesuai dengan target pada masing-masing sasaran strategis.

Capaian kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan I tahun 2025 seperti pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Capaian IKU dan IKK SKIPM Ternate Triwulan I

2.1. INDIKATOR KINERJA

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis SKIPM Ternate pada Triwulan I Tahun 2025 dapat Dilihat Pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja SKIPM TERNATE Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI TW I	%
SK 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70	-	-
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70	100	120
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	99	100	101,01
SK 2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	4.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	75	-	-
		5.	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	75	-	-
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	92	-	-
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	71,5	-	-
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	100	-	-
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Indeks)	87	-	-
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	86	-	-
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	85	-	-
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	76	99,06	120
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (%)	70	-	-
	14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)	88	99.69	113,28	

2.2 ANALISA DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil sesuai indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra BKIPM sesuai Permen PAN 53 Tahun 2024 dapat dijelaskan pada sasaran program sebagai berikut :

Sasaran Program 1.

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaan secara professional dan partisipatif yang berdaya saing menjadi tolak ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan SKIPM Ternate. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran adalah Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup SKIPM Ternate

IKS.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan isik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dilakukan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011 Indikator Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi Monev ruang lingkup sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan dan Sertifikasi Perpanjangan HACCP maupun Sertifikasi Terhadap ruang Lingkup UPI Baru.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan merupakan indikator penting dalam menilai seberapa besar hasil kelautan dan perikanan pasca panen memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Standar ini meliputi penerapan Pengendalian Mutu Mutlak Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) serta Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang

sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebuah pendekatan komprehensif untuk menjamin hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi konsumen. Sistem ini melibatkan rangkaian upaya pencegahan dan pengendalian sejak tahap pra-produksi, penanganan, pengolahan, hingga distribusi dan pemasaran. Tujuannya adalah untuk menghasilkan produk perikanan yang memiliki nilai tambah, menjaga kualitas, dan memperpanjang umur simpan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), Codex Alimentarius, dan standar perdagangan lainnya.

Pada sektor pasca panen, proses ini mencakup kegiatan seperti penanganan hasil tangkapan, pengolahan menjadi produk bernilai tinggi, penyimpanan dengan teknologi yang baik, distribusi yang efisien, dan pemasaran yang terarah. Seluruh kegiatan tersebut harus memenuhi kriteria standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten di bidang kelautan dan perikanan. Sebagai salah satu institusi penting dalam pengawasan dan penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Ternate merencanakan berbagai program pada tahun 2024 untuk mendukung pencapaian standar mutu dan keamanan pangan. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: Inspeksi dan Monev HACCP, Traceability, Surveilans HACCP dan Inspeksi Sertifikasi SKP.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Stasiun KIPM Ternate berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor perikanan di Maluku Utara sekaligus memastikan bahwa seluruh produk perikanan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas produk perikanan, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Realisasi Kegiatan :

1. Sertifikat HACCP Ruang Lingkup produk : 8 Ruang Lingkup

$$\%x = \frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$$

2. Rekomendasi : 22 dan SKP Terbit : 22

$$\%x = \frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$$

Capaian Indikator :

Persentase Pengukuran capaian indikator menggunakan rumus sehingga Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Ternate adalah:

$$\%x = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$
$$\%x = \frac{100\% + 100}{2} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 2.2. Target dan Realisasi IKS.2 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2024	Target	Triwulan I Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)	70	70	100	120	120

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan di triwulan I sudah tercapai untuk kekurangan target keseluruhan di 2025 akan dilaksanakan pada kegiatan di triwulan berikutnya.

IKS.3. Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu Dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)

Rasio ekspor hasil kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh UPT Stasiun KIPM Ternate pada bulan TW 1 Tahun 2025 menunjukkan capaian positif dalam menjamin mutu dan keamanan produk perikanan Indonesia yang sesuai dengan standar internasional.

Pada periode ini, komoditas ekspor utama adalah Frozen Yellowfin Tuna Loin dengan total volume mencapai 90.477 kg dan nilai sebesar Rp12.238.491.118, serta Frozen Yellowfin Tuna with Filtered Woodsmoke sebanyak 53.382 kg senilai Rp7.538.522.722. Produk lainnya yang juga diekspor meliputi Frozen Needle Fish, Frozen Fillet Trigger Fish, dan Frozen Yellowfin Tuna Loin dari berbagai pelaku usaha perikanan. Secara keseluruhan, volume ekspor mencapai 322.543 kg (sekitar 322,5 ton) dengan total nilai ekspor sebesar Rp43.937.076.507, dan frekuensi pengiriman sebanyak 21 kali. Dengan negara tujuan utama ekspor adalah:

- Vietnam, dengan total pengiriman sebanyak 5 kali,
- Thailand, sebanyak 4 kali, dan
- Korea Selatan, sebanyak 3 kali.

Keberhasilan ini didukung oleh sistem pengawasan mutu yang konsisten, termasuk inspeksi fasilitas dan pengujian laboratorium terhadap parameter mikrobiologi, kimia, dan cemaran bahan berbahaya. Seluruh pengiriman berjalan lancar tanpa adanya penolakan dari negara tujuan, yang menandakan tingginya kepercayaan pasar global terhadap produk perikanan dari wilayah Maluku Utara. Seluruh hasil ekspor pada TW 1 Tahun 2025 diterima dengan baik oleh negara tujuan tanpa adanya penolakan. Hal ini menunjukkan bahwa produk perikanan dari wilayah Maluku Utara telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan internasional, serta meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap komoditas perikanan Indonesia. Dengan presentase Pengukuran capaian indicator menggunakan rumus berikut :

$$x = \frac{A - B}{A} \times 100\%$$

Ket:

X = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Maka Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate yaitu:

$$x = \frac{21 - 0}{21} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga rasio ekspor ikan dan hasil perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate TW 1 Tahun 2025 yang tercapai 100% menunjukkan bahwa seluruh produk perikanan yang diekspor berhasil memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan negara tujuan. Hal ini mencerminkan efektivitas pengawasan, inspeksi, dan sertifikasi yang dilakukan. Implikasinya, kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan dari Indonesia, khususnya Maluku Utara, semakin meningkat, membuka peluang ekspor yang lebih besar, memperkuat posisi Indonesia di pasar global, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3. Target dan Realisasi IKS.01.4 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Target	Triwulan I Realisasi	%	% Thd Target Tahunan
Rasio Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu Dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	99	99	100	101,01	101,01

IKS.3.7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Persen)

Kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan 1 tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja pengadaan (PBJ) yang berdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Total sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) Satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar pada 10 (sepuluh) unit eselon 1 telah melakukan identifikasi

efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen). Data yang terbentuk pada kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca efisiensi, nantinya setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP dan digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sedangkan, revisi RUP yg dilakukan satker pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sehingga, berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya sebagai berikut;

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
31	BALAI KIPMHKP AMBON	1.659.694,000	1.031.308,000	628.386,000	0	628.386,000	100,00%
32	STASIUN KIPMHKP TERNATE	429.629,000	316.664,000	112.965,000	0	112.965,000	100,00%
33	BALAI UJI STANDAR KIPMHKP	6.408.384,000	3.693.415,000	2.714.969,000	0	2.714.969,000	100,00%
34	BALAI KIPMHKP TARAKAN	1.645.435,000	1.490.679,200	154.755,800	0	154.755,800	100,00%
35	STASIUN KIPMHKP PEKANBARU	2.140.551,000	1.748.549,000	392.002,000	0	392.002,000	100,00%
36	BALAI KIPMHKP LAMPUNG	1.470.733,574	525.392,250	945.341,324	0	945.341,324	100,00%
37	SEKRETARIAT BADAN KIPMHKP	44.427,679,000	37.526,741,000	6.900,938,000	397,042,000	7.297,980,000	105,75%
	TOTAL	117,224,732,574	74,786,968,852	42,318,573,722	397,042,000	42,715,615,722	100,94%



Ditandatangani Secara Elektronik

Sofiyanto

Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator ini 100 dari target TW I 76 atau mencapai 120 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 76 tiap triwulan. Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate seperti disajikan dalam tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4. Target dan Realisasi IKS.03.7 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Triwulan I			% Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	76	76	100	120	120

IK.03.9. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate (Nilai)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Adapun target yang ditetapkan pada triwulan 1 tahun 2025 adalah 88 dan telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Berikut beberapa catatan hasil validasi terhadap validasi nilai SKM sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan pada periode berikutnya yaitu:

1. Rata-rata nilai SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 93,58 dengan kategori nilai “Sangat Baik” melebihi dari target yang telah ditetapkan.
2. Nilai SKM tertinggi diperoleh oleh UPT SKIPM Ternate, SKIPM Batam dan SKIPM Pekanbaru. Sedangkan nilai SKM kurang dari target dicapai oleh SKIPM Gorontalo, SKIPM Kendari dan SKIPM Tanjung Balai Asahan.
3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 14 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 3 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu:
 - Layanan Penerbitan Sertifikat CPOIB (88,19)
 - Layanan Penerbitan Sertifikat CBIB (87,63)
 - Layanan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. (84,88)

Sehingga Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate (nilai) merupakan indikator utama Stasiun KIPM Ternate dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari survei kepuasan masyarakat. Survei yang dilakukan adalah secara elektronik yang diberikan kepada seluruh pengguna layanan Stasiun KIPM Ternate sebagai berikut:

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025
Tanggal : 14 April 2025

Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Unit Pelayanan lingkup BPPMHKP
Triwulan I Tahun 2025

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Keterangan
1	Stasiun KIPM Ternate	93,58	A	Sangat Baik	45	Tercapai
2	Stasiun KIPM Batam	89,04	A	Sangat Baik	29	Tercapai
3	Stasiun KIPM Pekanbaru	88,85	A	Sangat Baik	74	Tercapai
4	Balai KIPM Banjarmasin	87,82	A	Sangat Baik	182	Tercapai
5	Stasiun KIPM Luwak Banggai	87,65	A	Sangat Baik	13	Tercapai

Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator ini 99,69 dari target TW I 88 atau mencapai 113,28 % karena pengukurannya bersifat rata-rata tahunan, berdasarkan target Tahunan sebesar 88 tiap triwulan Indikator Ini dalam program akan dilaksanakan, realisasi Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Ternate seperti diasajikan dalam tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5. Target dan Realisasi IKS.02.1 pada Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Target	Triwulan I		% Thd Target Tahunan
			Realisasi	%	
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Ternate	88	88	99,69	113,28	113,28

2.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Ternate pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 032.13.2.649767/2025 sebesar Rp. 2,684,228,000 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 2.469.996.000,dan PNPB sebesar Rp. 214.232.000 Realisasi penyerapan anggaran SKIPM TERNATE pada Triwulan I Tahun 2025 mencapai Rp. 533,680,732 atau sebesar 19.88%. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM TERNATE T.A 2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.6. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan I 2024

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW I	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2,334,228,000	530,140,732	22.71
2	Pengendalian Mutu	205,000,000	2,040,000	1.00
3	Manajemen Mutu	145,000,000	1,500,000	1.03
TOTAL		2,684,228,000	533,680,732	19,88

Tabel 2.7. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI TW I	%
1	Belanja Pegawai	1,004,917,000	266,034,205	26.47
2	Belanja Barang	1,679,311,000	267,646,527	15.94
3	Belanja Modal	0	0	0,00
TOTAL		2,684,228,000	533,680,732	19.88

BAB III PENUTUP

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan untuk mengelola kelautan dan perikanan agar laut menjadi sehat dan biru. Diyakini kalau laut biru maka langit menjadi biru dan kehidupan di masa yang akan datang tetap berlanjut dengan baik. Hal ini memang bukan perkara mudah karena kegiatan perekonomian yang begitu luar biasa, di antaranya adalah kerusakan pesisir dan juga pulau-pulau kecil yang digunakan untuk kepentingan ekonomi yang sangat pragmatis serta eksploitasi penangkapan ikan yang tidak terukur. Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang ekonomi biru sebagai acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan dan kemakmuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya.

Strategi untuk mewujudkan komitmen tersebut dengan mengembangkan tiga pilar utama ekonomi biru, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial. Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan lima implementasi dalam kebijakan ekonomi biru, yakni penangkapan ikan terukur berbasis kuota, perluasan wilayah konservasi laut, pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, pengelolaan sampah laut, dan pengelolaan berkelanjutan pesisir serta pulau kecil. Pada penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dibagi dalam tiga distribusi kuota penangkapan, yaitu 35 % (tiga puluh lima persen) kuota untuk nelayan melalui koperasi, 64,90% (enam puluh empat koma sembilan puluh persen) kuota untuk industri dan 0,10% (nol koma sepuluh persen) kuota untuk hobi. Perluasan wilayah konservasi laut seluas tiga puluh persen akan ditetapkan di zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dibagi menjadi enam zona wilayah Indonesia. Targetnya adalah populasi ikan akan meningkat di setiap zona PIT.

Lebih lanjut, pada pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, memiliki tantangan dalam peningkatan kebutuhan produksi protein dan pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, yakni Indonesia perlu mengembangkan produk perikanan unggulan seperti udang, kepiting, lobster dan rumput laut, lalu hasil budi daya akan jadi mayoritas nilai ekspor perikanan Indonesia dan rumput laut akan menjadi bahan baku utama berbagai industri karena memiliki nilai strategis untuk menyerap karbon. Target dalam hal ini adalah untuk mengurangi kegiatan penangkapan ikan di laut untuk menjaga populasi dan meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri.

Terkait meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program yang dimulai pada tahun 2022 dengan nama “Bulan Cinta Laut”. Pada program tersebut, satu bulan dalam satu tahun nelayan tidak mengambil ikan, melainkan mengambil dan mengumpulkan sampah. Sampah tersebut akan dibayar sesuai harga ikan

terendah dan diolah untuk mendapatkan nilai ekonomi. Target dari program ini adalah dapat mengurangi sampah laut hingga tujuh puluh persen pada tahun 2030.

Selanjutnya, terkait pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil yang tidak sesuai aturan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan dalam pengelolaan aktif pesisir dan pulau kecil berbasis keberlanjutan. Kebijakan tersebut meliputi, penerapan rencana tata ruang laut yang komprehensif, lalu semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung, dan mitigasi dampak, serta setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Target dalam hal ini adalah menjaga pesisir dan pulau kecil agar tidak rusak akibat aktivitas ekonomi.

Dalam melaksanakan 5 program utama pembangunan kelautan dan perikanan, maka BPPMHKP melalui Unit Pelaksana Teknis melalui pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2025, SKIPM Ternate telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target. IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan I disebabkan pencapaian targetnya ada yang dilaksanakan di Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja SKIPM Ternate pada Triwulan I adalah:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang akan dilaksanakan di triwulan berikutnya.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Triwulan berikutnya sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun, agar dapat direalisasikan pada awal Triwulan I.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja SKIPM Ternate Triwulan I Tahun 2025 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SKIPM Ternate kepada Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP), serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.





Laporan Kinerja Triwulan I 2025